IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU (YAPI) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021

Oleh: Laila Pazila

Pembimbing: M. Rafi, S.I.P., M.I.P

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28291

Telp/Fax.0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh adanya permasalahan terkait realisasi penyaluran bantuan dana untuk anak yatim piatu yang masih tidak tepat sasaran, dimana idealnya yang menerima bantuan yatim, piatu, dan yatim piatu dari Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru seharusnya adalah anak yatim piatu yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru tahun 2021.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana lokasi penelitian ini berada di Sentra Abiseka Pekanbaru. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI) yang meliputi tahapan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, tahapan komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling terlihat masih perlu perbaikan, dimana meskipun komunikasi telah berjalan namun dalam prosesnya masih memiliki kelemahan pada data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tidak relevan dengan keaslian data yang dikirim ke Sentra Abiseka Pekanbaru. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru tahun 2021 meliputi ketersediaan sumber daya yang terbatas dan minimnya partisipasi dari wali anak yatim piatu dalam proses penetapan penyaluran bantuan yang kemudian telah mempengaruhi implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Asistensi Rehabilitasi Sosial, Anak Yatim Piatu

ABSTRACT

This research is based on problems related to the realization of the distribution of financial aid for orphans which is still not on target, where ideally those who receive aid for orphans, orphans and orphans from the Ministry of Social Affairs through the Pekanbaru Abiseka Center should be orphans who really need it. help. The aim of this research is to describe policy implementation and the factors that influence the implementation of social rehabilitation assistance policies for orphans, orphans and orphans (YAPI) in Pekanbaru City in 2021.

The research method used is descriptive qualitative, where the location of this research is at the Abiseka Pekanbaru Center. Then, the data collection techniques used were interviews and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out using

qualitative descriptive analysis techniques which describe data and information based on existing facts and then analyzed systematically. The results of this research show that in the implementation of the social rehabilitation assistance policy for orphans, orphans and orphans (YAPI) which includes the communication, resource, disposition and bureaucratic structure stages, the communication stage in policy implementation is the most visible aspect that still needs improvement, where Even though communication has been running, the process still has weaknesses in the data from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is not relevant to the authenticity of the data sent to the Pekanbaru Abiseka Center. Then, the factors influencing the implementation of the social rehabilitation assistance policy for orphans, orphans and orphans (YAPI) in Pekanbaru City in 2021 include the limited availability of resources and the minimal participation of guardians of orphans in the process of determining the distribution of aid which has then been influencing the implementation of social rehabilitation assistance policies for Orphans, Orphans and Orphans (YAPI) in Pekanbaru City.

Keywords : Implementation, Policy, Social Rehabilitation Assistance, Orphans

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Implementasi secara umum berarti penerapan atau pelaksanaan. Kebijakan adalah fungsi pemerintah dalam membuat keputusan dari lembaga-lembaga pemerintahan yang bersifat mengikat dengan lembaga tersebut. Suatu Negara perlunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan bersama antara pemerintah dengan pemerintahan. Sehingga implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga atau instansi untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran yang ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan hidup yang layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas. Peraturan Menteri Sosial tentang atensi menjadi payung hukum untuk mengendalikan program dan kegiatan yang menjadi otoritas Kementerian Sosial. Tujuan atensi untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial dan mengatasi masalah kehidupan. Menurut pasal 11 ayat 1 merupakan bantuan uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin,

tidak mampu, atau rentan terhadap resiko sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa anak yatim dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara, jadi dikatakan anak yatim piatu ketika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia dan anak tersebut berusia dibawah 18 tahun, akan tetapi anak yatim yang telah melakukan perkawinan, maka status anak yatim otomatis hilang.

Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 merupakan anak yang rentan secara mendadak menjadi anak yatim, piatu, yatim piatu yang kehilangan orangtua yang meninggal akibat Covid-19. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 sangat membutuhkan perlindungan sosial dalam rangka tumbuh kembangnya menuju dewasa.

Anak yatim piatu seharusnya di hargai peranannya dalam mendukung pembangunan nasional. Yatim piatu perlu mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial demi tercapainya keberlangsungan hidup yang mengarah pada kesejahteraan. Anak yatim piatu dapat ditandai dengan tercapainya hak-haknya baik, hak pemenuhan kebutuhan sosialnya, mendapatkan perlindungan, rasa keselamatan, ketentrangan lahir maupun batin. Semua ini dapat terwujud jika didukung dengan sebuah program-program yang memberikan keberpihakan kepada Anak Yatim Piatu (YAPI).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial. Pasal 4 menjelaskan Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan syarat bagi anak yatim, piatu, yatim piatu (YAPI) akibat

dampak Covid-19 yang menerima bantuan sosial tunai di antaranya adalah terdaftar dari orang tua yang meninggal akibat Covid-19 dan datanya didapat dari pusat. Kriteria penerima berhak menerima bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu anak yang berusia dibawah 18 tahun dengan status yatim, piatu, atau yatim piatu dan tergolong tidak mampu. Penerima mendapatkan 600.000.00 yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan. Berarti 200.000.00 perbulan penerima bantuan langsung dari Kementerian Sosial untuk Anak Yatim Piatu.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (1) huruf (a) menjelaskan program Rehabilitasi Sosial yaitu tentang anak. Sehingga anak menerima manfaat Asistensi Rehabilitasi Sosial merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut pasal 5 menjelaskan bahwa “Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, selain itu memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan pasal 11 ayat (1) huruf (f) menjelaskan Asistensi Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan dalam bentuk bantuan dan asistensi sosial. Bantuan tersebut berupa uang, barang, jasa pelayanan atau jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi. Sehingga bantuan dari Kementerian sosial untuk anak yatim piatu berupa uang yang ditransfer setiap bulannya melalui

rekening buku tabungan masing-masing anak yatim piatu.

Pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang bertanggung jawab atas penyaluran adalah Pekerja Sosial (Peksos) yang mendata ke lapangan yaitu Staf dan disetujui oleh dinsos/sentra (balai anak), untuk dana dari Kementerian Sosial.

Pekerja Sosial untuk pendataan anak yatim piatu sebanyak 28 pendamping rehsos, masing-masing Pekerja Sosial mendata 5-15 anak tergantung jangkauan lokasi terdekat dari kecamatan penugasan masing-masing Pekerja Sosial dan disetujui oleh masing-masing Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (8) menjelaskan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Setelah itu, Pasal 1 Ayat (9) menjelaskan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kemudian, Pasal 1 Ayat (11) menjelaskan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Oleh karena itu, data yang didapatkan dari pemerintahan daerah menuju pemerintahan pusat, ketika tidak terdata dari pemerintah daerah yaitu dari (Kecamatan/Kabupaten/kota)

maka bantuan tidak disalurkan oleh Kementerian Sosial. Hal ini menyebabkan beberapa data anak yatim, piatu dan yatim piatu tidak termasuk dalam bantuan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran. Sehingga yang terkait dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Sentra Abiseka Pekanbaru yaitu Desentralisasi, dimana penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom yang berdasarkan asas otonomi.

bantuan Kementerian Sosial yang di salurkan kepada anak yatim piatu melalui Pekerja Sosial (Peksos) secara langsung melalui pihak Kementerian Sosial. Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Abiseka Sentra Rumbai di Kota Pekanbaru untuk membantu anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19. Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru sebagai UPT Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Provinsi Riau yang menyalurkan realisasi bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial. sehingga Anak di bawah umur yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19 dianggap sebagai anak dalam situasi darurat dalam rangka perlindungan khusus anak dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berkaitan dengan Perlindungan Anak.

Tabel 1 Data jumlah Penerimaan Bantuan Anak Yatim Piatu Terdampak Covid 19 Tahun 2021-2023.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	119
2.	2022	109
3.	2023	105

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah Anak yatim, piatu dan yatim piatu (YAPI) pada tahun 2021 sebanyak 119 orang, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 109 orang dan tahun 2023 sebanyak 105 orang. Sehingga diketahui bahwa tahun 2021 menunjukkan jumlah penerimaan bantuan anak yatim piatu di Kota Pekanbaru angka yang sangat tinggi akibat Covid-19.

Tabel 2 Data Jumlah Anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ayah	Ibu	Ayah dan Ibu	Total
1.	Bukit Raya	11	1	2	14
2.	Marpoyan Damai	10	1	0	11
3.	Payung Sekaki	2	3	0	5
4.	Rumbai	5	2	0	7
5.	Rumbai Pesisir	14	6	0	20
6.	Sail	1	0	0	1
7.	Sanapelan	6	4	0	10
8.	Sukajadi	1	1	0	2
9.	Tampian	13	8	0	21
10.	Tenayan Raya	3	3	0	6
Total		66	29	2	97

Sumber: Sentra Abiseka Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan data diatas jumlah anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19 sebanyak 10 Kecamatan di Kota Pekanbaru. Sehingga diketahui bahwa Kecamatan Tampian sebanyak 21 orang tua yang meninggal atau yang paling banyak terdapat anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti Kecamatan Tampian. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan untuk usia anak yatim piatu dibawah umur 18 tahun.

Tabel 3 Data Jumlah Anak Yatim Piatu Kecamatan Tampian di Kota Pekanbaru.

No.	Kelurahan	Jumlah Anak	Bank Penyaluran	Perbulan	Keterangan salur
1.	Delima	13	Mandiri	200.000	Sukses Salur
2.	Sialangmunggu	12	Mandiri	200.000	Sukses Salur
Total		25	Anak		

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jumlah anak yatim piatu Kecamatan Tampan sebanyak 25 anak yatim piatu yaitu di Kelurahan Delima dan Sialangmunggu. Data tersebut merupakan data dari Kecamatan Tampan sebelum terjadinya pemekaran di Kecamatan Tampan. Bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pekerja Sosial (Peksos) yang di terima setiap bulan 200.000 melalui Bank Mandiri, anak yatim yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melauai Pekerja Sosial berusia 5-16 tahun. Sehingga Sebagian wali orang tua anak mengambil setiap 3 bulan sekali sebesar 600.000 dari kartu ATM masing-masing anak yatim piatu di Kelurahan Delima dan Sialangmunggu merupakan anak yang berusia 5-16 tahun. Dalam konteks penelitian ini ada bebrapa kendala SDM Pekerja Sosial (Peksos) di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, (Kelurahan Delima dan Sialangmunggu) serta wali anak yatim piatu dalam penyaluran bantuan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Pertama, dalam menyalurkan bantuan kepada anak yatim piatu oleh Kementerian Sosial RI dalam prosesnya tidak ada pemberitahuan yang berbasis aplikasi seperti *mobile banking* dan *SMS banking*, sehingga wali orangtua dari anak yatim piatu di Kelurahan Delima dan Sialangmunggu tidak mengetahui secara jelas terkait adanya bantuan perbulan yang sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam prosesnya, Pihak Pekerja Sosial (Peksos) di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Delima dan Sialangmunggu selalu menginformasikan bahwa uang bantuan untuk anak yatim piatu sudah disalurkan dan secepatnya harus diambil, karena jika tidak diambil maka akan ditarik lagi oleh Kementerian Sosial.

Kedua, dalam proses penyaluran bantuan di Kelurahan Delima dan Sialangmunggu sebagai penerima bantuan

anak yatim piatu hanya memiliki buku tabungan, sementara disisi lainnya pengambilan uang bantuan masing-masing anak yatim piatu diambil oleh wali orang tua anak dalam proses yang dilakukan 1-3 bulan sekali, sehingga sebagian wali orangtua anak cenderung malas mengambil uang bantuan tersebut melalui ATM anak masing-masing setiap bulan.

Ketiga, masih terjadinya pelaksanaan penyaluran bantuan dana untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu yang cenderung tidak tepat sasaran. Hal ini terlihat dari masih terjadinya fenomena dan permasalahan terkait wali orang tua anak yatim piatu yang mampu dan bisa menghasilkan banyak uang dalam pekerjaannya sehari-hari, namun masih tetap eksis dalam mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial RI. Oleh karena itu, pembicaraan antara wali orang tua anak yatim piatu di Kelurahan Delima dan Sialangmunggu peneliti mendapatkan informasi bahwasanya telah terjadi bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, isu dan permasalahan terkait penyaluran bantuan dana untuk anak yatim piatu yang tidak tepat sasaran di Kelurahan Delima dan Sialangmunggu dalam prosesnya terus dikeluhkan oleh masyarakat lokal dan sering diperbincangkan dalam ranah publik.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, terlihat bahwa dalam proses penyaluran bantuan dana untuk anak yatim piatu masih terjadi dinamika dan permasalahan terkait adanya bantuan yang disalurkan secara tidak tepat sasaran pada sebagian orang tua yang kaya (mampu) pada masa pandemi Covid-19. Dalam prosesnya, tentu saja anak yang seharusnya menerima bantuan dari Sentra Abiseka Pekanbaru melalui Pekerja Sosial idealnya merupakan anak yatim yang betul-betul membutuhkan bantuan dari Kementerian Sosial, sementara disisi lainnya permasalahan terkait proses penyaluran bantuan yang disalurkan secara tidak tepat sasaran masih saja

terjadi.¹ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru Tahun 2021”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru tahun 2021?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru tahun 2021?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru tahun 2021.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru tahun 2021.
3. Manfaat Akademis secara penelitian ini berguna untuk menambah referensi keustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau khususnya pada program studi Ilmu Pemerintahan. Serta menjadi

4. bahan rujukan baru bagi peneliti berikutnya. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi terhadap Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Abiseka Kota Pekanbaru agar bisa mengimplementasikan kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu menjadi optimal atau menjadi lebih baik.

D. KERANGKA TEORI

a) Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III terdapat 4 indikator implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor (bertanggung jawab dalam mengimplementasikan dalam sebuah kebijakan) mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Menurut Edward III proses komunikasi kebijakan dibagi menjadi tiga yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi

2. Sumber Daya

Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian pelaksana, informasi yang memadai dan tepat untuk melaksanakan kebijakan dan penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan anak yatim piatu, adanya kewenangan untuk menjamin kebijakan dapat dilaksanakan. Sehingga rencana serta adanya dukungan. Sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan bantuan seperti pendanaan dan prasarana.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap para pelaksana kebijakan yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan, apabila personil yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Sehingga pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan meliputi orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah di tetapkan, khususnya kepentingan warga.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi sebagai Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

b) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

1. Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Anggaran.

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan, karena dalam suatu terwujudnya kebijakan adanya tujuan dan tindakan yang diambil dengan sebaik-baiknya. Sumberdaya anggaran dan peralatan menjadi pendukung utama untuk tercapainya suatu tujuan kegiatan yang dilakukan pemerintahan. Peralatan tersebut berguna untuk menjalankan suatu implementasi kebijakan, sedangkan anggaran menentukan jumlah yang dikeluarkan dalam kebijakan.

2. Partisipasi

Menurut Isbandi, merupakan keikutsertaan suatu kelompok dalam proses mengidentifikasi masalah atau potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif adalah solusi untuk

menangani suatu masalah. Secara singkat partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari suatu kelompok atau seseorang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam suatu program Pembangunan dan keterlibatan dalam pelaksanaan dan *monitoring* agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif menggunakan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Sentra Abiseka Pekanbaru. Alasannya sebagai lokasi sekaligus objek penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya melalui berita, situasi, kondisi saat ini dan karya ilmiah menjelaskan mengenai Implementasi Kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu (YAPI). Kota Pekanbaru merupakan gerak agar terlaksananya "Implementasi Kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu (YAPI) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru".

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian.

- b. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Azman, S.H., M.H.	Koordinator Ketua Sentra Abiseka Pekanbaru	1
2.	1. Moralely Hendrayani, S.Sos, M.A 2. Zulniyelfita, S.ST	Pekerja Sosial (Peksos)	2
3.	1. Titi Sumarni 2. Jernilan 3. Naimatun 4. Wira Sandika 5. Saidina Ali 6. Dami	Masyarakat (wali orang tua anak)	6
Jumlah			9 orang

diperoleh dari bacaan-bacaan ataupun kajian Pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

4. Sumber Data

Tabel 4. Informan Penelitian

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan untuk tujuan tertentu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa terbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.” Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non-verbal dan adanya hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992), ada 4 (empat) tahapan deskriptif kualitatif yang meliputi:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru tahun 2021.

Anak yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah anak yang berusia 18 (deapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yatim piatu diasuh oleh wali orang tua anak dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan anak kasih sayang, kedekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak yatim piatu adalah anak yang didapat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data base yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria masing-masing anak yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Sosial melalui Pekerja Sosial (Peksos).

Pendamping Rehabilitasi Sosial (Pendamping Rehsos) adalah suatu

sumber daya manusia dalam kesejahteraan sosial yang meliputi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang bekerja dibidang atensi. Sehingga Pekerja Sosial sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta mendapatkan sertifikat kompetensi.

Kementerian Sosial RI bekerjasama dengan Sentra Abiseka Pekanbaru untuk menindaklanjuti Penerimaan Manfaat secara langsung berupa uang tunai untuk anak yatim piatu dari Kementerian Sosial dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dari pihak Kementerian Sosial dan masih terdapat permasalahan ketika pendataan ulang anak yatim piatu yang tidak sesuai dengan data pemerintah pusat. Sementara pihak Pekerja Sosial selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial anak yatim piatu, baik dari mulai pendataan dirumah sampai dengan pencairan uang oleh Bank Mandiri.

Sumber daya manusia dalam pendamping rehabilitasi sosial anak yatim piatu yang dilaksanakan oleh pekerja sosial di Kelurahan Delima dan Kelurahan Sialangmunggu, tetapi terdapat permasalahan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan secara langsung melalui buku tabungan dan kartu ATM masing-masing anak yatim piatu, sehingga masyarakat terkendala tidak adanya pemberitahuan *SMS Banking* ketika uang tersebut telah dicairkan/tersalurkan.

Indikator disposisi berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan, seperti adanya kecenderungan aspek disposisi yang masih bermasalah antar para pelaksana kebijakan (Kementerian Sosial RI dan Sentra Abiseka Pekanbaru) yang terlihat dari belum sepenuhnya optimal dalam menyelesaikan masalah terkait eksistensi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Sehingga penerimaan manfaat anak yatim piatu ditetapkan pengambilan

melalui buku tabungan secara langsung ke Bank Mandiri.

Kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arahan/pelatihan yang diberikan kepada pekerja sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru. Terkait permasalahan SMS Banking tidak ada pemberitahuan itu tidak masalah bagi wali anak yatim piatu, karena pihak pekerja sosial siap mendampingi wali anak dalam proses pencairan bantuan uang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan yang tidak tepat sasaran akan ditanyakan kembali oleh pihak pekerja sosial tentang data yang dikirim dari pusat dan diserahkan ke Sentra Abiseka Pekanbaru dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial, karena data tersebut berasal dari pusat, karena ini terus terulang kembali akibat dari pengajuan dari pihak RT/RW yang mendaftarkan penerimaan bantuan anak yatim piatu, sehingga data tersebut telah terdaftar pemerintah pusat, jadi pihak Sentra Abiseka Pekanbaru tidak mengetahui masalah itu, ketika telah didata ulang baru ketahuan sebagian penerimaan bantuan yang tidak tepat sasaran.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (YAPI) di Kota Pekanbaru tahun 2021.

1) Sumberdaya Manusia, Anggaran dan Peralatan.

Sumberdaya anggaran dan peralatan merupakan pendukung utama untuk tercapai tujuan kegiatan Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi anak yatim piatu. Sehingga dari segi peralatan anggaran telah tercukupi, tetapi ada kendala dari pencairan anggaran oleh masyarakat. Sumber daya manusia meliputi staf Sentra Abiseka Pekanbaru yaitu adanya ketua, pekerja sosial dan masyarakat. Peralatan yang dikeluarkan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru untuk Asistensi Rehabilitasi

Sosial anak yatim piatu berupa bantuan uang tunai setiap bulannya.

Penerimaan bantuan anak yatim, piatu dan yatim piatu di Kelurahan Delima dan Kelurahan Sialangmunggu berjumlah 25 orang, dimana masing-masing penerima bantuan sebesar 200.000. sehingga anggaran yang dikeluarkan satu tahun untuk Kelurahan Delima dan Kelurahan Sialangmunggu sebesar 60.000.000/pertahun dari Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru sudah diserahkan dan diterima secara langsung melalui transfer kerekening masing-masing anak yatim piatu.

Sumberdaya, anggaran, peralatan telah dilaksanakan dengan baik dan optimal bagi penerimaan bantuan yang berlaku untuk seluruh atensi penerimaan, terutama untuk anak yatim piatu. Bantuannya bersifat secara langsung di berikan kepada wali orang tua anak melalui buku tabungan masing-masing anak yatim piatu, tujuannya dikeluarkan untuk kepentingan anak sekolah, seperti peralatan sekolah anak yang meliputi pena, tas, sepatu, baju dan lain-lain. Sentra Abiseka Pekanbaru menyikapi bantuan yang tidak tepat sasaran akan ditindaklanjuti kembali apakah anak tersebut berhak sebagai penerimaan bantuan, jika tidak berhak ini akan diproses kembali oleh pihak pekerja sosial dalam mendata langsung kelapangan.

2) Partisipasi Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim piatu.

Implementasi kebijakan perlu adanya peran dari setiap elemen untuk membuat kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial anak yatim, piatu dan yatim piatu di Kota Pekanbaru. Kurangnya partisipasi antara ketua, pekerja sosial dan masyarakat dalam bantuan merupakan salah satu faktor yang

menghambat pelaksanaan bantuan asistensi rehabilitasi sosial ini, karena penting bagi para wali orang tua anak dalam mendapatkan perhatian dan dukungan dari Pemerintahan melalui Sentra Abiseka Pekanbaru.

Partisipasi bersifat terbuka, karena sebagian wali orang tua anak malas/enggan mengambil setiap bulan, sehingga mereka menunggu 3 bulan sekali akibat tidak adanya *SMS Banking*, maka pihak pekerja sosial menghubungi langsung wali orang tua anak yatim piatu. Partisipasi dilakukan bersama ketua maupun staf dari Sentra Abiseka Pekanbaru. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kebijakan yaitu sumberdaya, peralatan dan anggaran di nyatakan sudah optimal dijalankan dengan baik, adanya partisipasi yang dilakukan ini merupakan kebijakan yang akan dilaksanakan dengan baik. Sehingga peneliti menyatakan implementasi kebijakan asistensi rehabilitasi sosial anak yatim, piatu dan yatim piatu sudah berhasil dilaksanakan.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

Pertama, komunikasi telah berjalan, namun memiliki kelemahan pada data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Abiseka Pekanbaru terkait data yang diserahkan pemerintah pusat. Sehingga sebagian data tersebut tidak sesuai dengan keaslian data yang dikirim ke Sentra Abiseka Pekanbaru.

Kedua, ketersediaan sumber daya oleh Kementerian Sosial RI dan Sentra Abiseka Pekanbaru beserta Pekerja Sosial telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menginformasikan terkait penerimaan bantuan uang tunai dan hal yang akan dilakukan lebih lanjut untuk masing-masing wali orang tua anak yatim piatu.

Ketiga, dalam proses disposisi telah berjalan, karena sikap para pelaksana kebijakan (Kemensos RI dan Sentra Abiseka Pekanbaru) telah melaksanakan tugas regulasi yang ada. Namun, masih terjadi beberapa hambatan seperti adanya keluhan masyarakat terkait bantuan yang tidak tepat sasaran yang masih menjadi kendala yang harus diperbaiki oleh para pelaksana kebijakan.

Keempat, Struktur Birokrasi sudah dilaksanakan karena dari pihak pekerja sosial yang siap siaga dalam mendampingi masing-masing wali orang tua anak yatim piatu di Kelurahan Delima dan Kelurahan Sialangmunggu. Sehingga permasalahan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tidak masalah jika pencairan hanya melalui ATM dan buku tabungan, karena pihak pekerja sosial siap sebagai pendamping dalam proses pencairan bantuan uang yang dikeluarkan Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial anak yatim, piatu di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru terbagi menjadi dua yaitu:

Pertama: Sumberdaya, peralatan dan anggaran sudah dilaksanakan, tetapi masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran, bantuan yang dikeluarkan setiap penerimaan masing-masing anak

yatim piatu sebesar 200.000 perbulan. Sehingga sudah di tetapkan oleh Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru.

Kedua: Partisipasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam proses adanya masyarakat sebelum bantuan yang dilakukan, bahwa selama ini wali orang tua anak tidak mengetahui bantuan yang dikeluarkan secara langsung oleh (Kemensos melalui Sentra Abiseka Pekanbaru), dan hal ini penerimaan bantuan hanya mempunyai ATM dan buku tabungan.

H. SARAN

1. Kepada Kementerian Republik Indonesia melalui Sentra Abiseka Pekanbaru sebaiknya ada perubahan terhadap penerimaan bantuan yang dapat informasi melalui *SMS Banking (mobile banking)*. Sehingga Pekerja Sosial menjadi mudah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Abiseka Pekanbaru terkait bantuan yang tidak tepat sasaran bisa ditindaklanjuti atau diberi sanksi kepada penerima, supaya ini tidak terjadi lagi.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmaja, M. W. (2013). Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik. *Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, 1–20.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March).
- Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Awan Y. Abdoellah. (2016). *Teori Dan*

- Analisis Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Budiman, Rusli. (2013). Kebijakan Publik (membangun pelayanan publik yang responsif
- Dian Cita Sari, Dkk. (2020). Manajemen Pemerintahan. Ideas Publishing
- Eko Agustina, D. (2015). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Calpulis
- Evi Satispi & Kurniasih. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. Um Jakarta Press
- Malian, S., & As'ad, M. U. (2021). Kebijakan Publik dalam Negara Hukum. In *Kreasi Total Media*.
- Leo, & Agustino, P. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA ,cv. Bandung.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.)). UNISRI Press.
- Winarno, Budi. (2002). Analisis Kebijakan Publik, *Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik, 1993*, 15.
- Si, H. M., Medica, P., Husada, F., Ustiawaty, J., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).
- Jurnal:**
- Akbar, M., Nurul, P., & Prayoga, D. (2022). Menakar Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Bidang Lanjut Usia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 23(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v23i1.351>
- Amanda, P. I. (2019). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government, 1*, 34–38.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/300390600>
- Haeruddin, H. (2022). Sasaran dan Mekanisme Program ATENSI Lanjut Usia di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gau Mabaji. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 10*(2), 168–174.
- Hikmat Harry. (2001). Pedoman Operasional Atensi Anak. “*Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI*. Jakarta.
- Iii, B. A. B. (2011). *Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. 1*(Ppsp), 231–237.
- Kementerian Sosial. (2021). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. *Sekretariat Negara, 1007*.
- Pandoman, A. (2022). Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.47200/awtjhp.v2i1.1331>
- Pioh, E., Posumah, J., & Tulusan, F. (2015). Implementasi Kebijakan Pengasuhan Anak Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Panti Asuhan Nazareth Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(029), 1300.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Retnaningsih, H. (2021). Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal*

Masalah-Masalah Sosial, 12(2), 237–253.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2101>

- Rika Rani Sijabat, & Dadang Mashur. (2022). Inclusive Governance Dalam Penanganan Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 01–12.
<https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.456>
- Vawitrie, Y. (2018). Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 5(II), 1–13.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 149.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI),
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Website:

- <http://www.orami.co.id/magazine/perbedaan-yatim-dan-piatu>
- <http://dinsos.tanjabbarkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- <https://yatimmandiri.org/blog/inspirasi/anak-yatim>
- [Profil Sentra Abiseka Pekanbaru.](#)